

TANGGAPAN BP TERHADAP

LAPORAN KEDUA PANEL INDEPENDEN TANGGUH

MENGENAI OPERASI DAN PENGEMBANGAN

PADA

LNG TANGGUH

Januari 2018

Akronim dan istilah dalam bahasa Indonesia

ADAT	Hak khusus Adat
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BIN	Badan Intilijen Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CSTS	Chiyoda, Saipem, Tripatra and Suluh Ardi – Konsorsium TEP dibawah kontrak EPC
DBH	Dana Bagi Hasil
DBH SDA	Dana Bagi Hasil untuk Sumber Daya Alam
EPC	<i>Engineering, procurement and construction</i> Teknik, pengadaan dan konstruksi
ER/IR	<i>Employee relation /Industrial relation</i> Hubungan Karyawan / Hubungan Industri
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GOI	Pemerintah Indonesia
GTP	Gas untuk Listrik
HSE	<i>Health, Safety and the Environment</i> Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
ICBS	<i>Integrated Community-Based Security</i> Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
IEDP	<i>Indigenous Enterprise Development Programme</i> Program Pembangunan Kewirausahaan Pribumi
IHT	In-house human rights training. Pelatihan Hak-hak Asasi Manusia Swakarya
JUKLAP	Petunjuk Lapangan
Kabupaten	Distrik atau kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Elsham	LSM Hak Asasi Manusia di Papua
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum
LNG	<i>Liquefied natural gas</i> Gas Alam Cair
Mmscfd	Juta Standar Kaki Kubik per Hari
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
MOEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MOU	Memorandum of understanding Nota Kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> Lembaga Swadaya Masyarakat
NSH	<i>North Shore Housing</i> Perumahan Pantai Utara
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus	Peraturan Daerah Khusus
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PGN	Perusahaan Gas Negara
PoD	Rencana Pengembangan
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polsek	Kepolisian Sektor
Proper	Audit kepatuhan AMDAL yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> Kontrak Bagi Hasil
PSCM	<i>Procurement and Supply Chain Management</i> Manajemen Pengadaan dan Rantai Pasokan
PSKK UGM	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
S&OR	<i>Safety and Operational Risk</i> Risiko Keselamatan dan Operasional
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SOA	<i>Supply Offtake Agreement</i> Kesepakatan Pembelian Produksi Pertambangan
SPA	<i>Sales Purchase Agreement</i> Perjanjian Jual Beli
TEP	<i>Tangguh Expansion Project</i> Proyek Pengembangan Tangguh
TIAP	<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i>

Panel Penasihat Independen Tangguh

TNI Tentara Nasional Indonesia

TPC *Third-Party Contract*
Kontrak Pihak Ketiga

VPSHR *Voluntary Principles on Security and Human Rights*
Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan Dan Hak Asasi Manusia

Pengantar

BP mengucapkan terima kasih kepada Panel Penasihat Independen Tangguh (TIAP) yang kini menjabat, atas laporan dan analisis ahli, tantangan dan panduan yang diberikannya. Fokus utama TIAP adalah masalah keamanan, hak asasi manusia, tata kelola dan pengelolaan pendapatan, serta isu-isu non-komersial lain. Isi laporan ini melengkapi kajian independen panel eksternal yang dilaksanakan oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh.

Rekomendasi yang diberikan TIAP yang saat ini tengah menjabat dan pendahulunya sangat bermanfaat untuk mendukung upaya kami menjadikan Proyek Tangguh sebagai barometer keberhasilan kerja sama dengan masyarakat lokal dan mitra lain untuk mengelola isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks. TIAP membantu kami memastikan LNG Tangguh memberikan manfaat bagi BP, masyarakat lokal, pemerintah, karyawan, konsumen dan investor.

Kunjungan TIAP terdahulu dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 18 September 2015. Lapornya diterbitkan bulan Desember 2015 dan memuat 31 rekomendasi. Topik-topiknya mencakup keamanan dan hak asasi manusia, ketenagalistrikan dan program power, program sosial dan hubungan pemerintah, perumahan pantai utara, tenaga kerja Papua, pengembangan bisnis Papua, dan lingkungan. BP telah menanggapi dan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut (perkembangan terkini dapat dilihat di Lampiran A).

Kunjungan terakhir TIAP dilakukan dari tanggal 4 hingga 12 September 2017 dan laporannya telah diterbitkan di bulan Desember 2017. Dalam laporan ini, TIAP menyoroti tantangan akibat operasi simultan pabrik Tangguh dan konstruksi TEP. Tantangan tersebut termasuk masalah keselamatan dan keamanan, perubahan sosial dan politik di tingkat nasional dan lokal, serta klaim masyarakat yang tersisa mengenai kompensasi hak adat.

Kami sangat menghargai rekomendasi mendalam yang disajikan dalam laporan komprehensif ini. Kami yakin laporan ini akan terus membantu kami untuk terus mengelola semua risiko dan tantangan yang akan kami hadapi saat mengoperasikan Tangguh dalam jangka panjang serta mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Mengenai Proyek LNG Tangguh

Tangguh LNG memproduksi dan mengekspor gas alam cair (LNG) dari kontrak bagi hasil Berau, yang terletak di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia, sekitar 3.000 kilometer di sebelah timur Jakarta. Tangguh LNG merupakan aset strategis nasional.

Gas ditemukan di Teluk Bintuni pada tahun 1994 dengan cadangan terbukti sebanyak 14 triliun kaki kubik (tcf). Gas diekstraksi melalui sumur yang digali menggunakan dua anjungan tak berawak - yaitu Vorwata-A dan Vorwata-B, kemudian dialirkan ke kilang pengolahan di sebelah selatan teluk melalui pipa bawah laut sepanjang 22 kilometer. Fase ekspansi untuk membangun Kilang LNG tambahan dan dua anjungan lepas pantai tak berawak saat ini sedang berlangsung. Produksi LNG pertama kali dimulai pada Juni 2009, dan pengiriman pertama dilakukan sebulan setelahnya menggunakan kapal tanker ke Korea Selatan. Sepanjang tahun 2016 dan 2017, Tangguh terus memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang pada kapasitas saat ini beroperasi sebesar 7,6 juta ton per tahun. Mulai Januari hingga Desember 2017, Tangguh telah mengantarkan 110 kargo. Sejak produksi dimulai pada tahun 2009, total yang telah dikirim mencapai 875 kargo. Selama tahun 2017, pabrik beroperasi dengan aman tanpa masalah ER/IR. Frekuensi cedera yang dapat direkam (RIF) pada tahun 2017 adalah 0,04, lebih rendah dari tahun 2016.

Tangguh memiliki tujuh Perjanjian Jual Beli (SPA). Perjanjian ini untuk memasok LNG ke POSCO dan SK E&S Co., Ltd di Korea Selatan, Sempra LNG International LLC di Meksiko, CNOOC Fujian LNG Co.Ltd di China, serta Tohoku Electric Power Co., Inc., Chubu Electric Power Co.Inc., dan Kansai Electric Power Co. Inc. di Jepang. BP terus mencari peluang untuk memaksimalkan nilai kargo LNG Tangguh. Sejak 2010, beberapa kargo yang dialihkan

dari Sempra telah dijual di pasar Asia dalam bentuk kontrak jangka menengah atau penjualan spot. Sejak 2013, Tangguh telah mengirimkan kargo ke pasar domestik termasuk untuk PLN, PGN, dan Nusantara Regas dari kargo yang dialihkan dari Sempra. Ini telah mengubah profil Tangguh secara signifikan di Indonesia sebagai penyedia kebutuhan energi dalam negeri.

Ke depannya, Tangguh berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan operasional yang aman, andal dan meningkatkan efisiensi operasional Kilang 1 dan 2 pada kapasitas penuh, sementara pengembangan untuk membangun Kilang 3 tengah direncanakan. Proyek Pengembangan Tangguh untuk membangun pengolah dan fasilitas pendukung Kilang LNG ketiga - meningkatkan kapasitas produksi fasilitas sebesar 3,8mtpa - telah diberi sanksi pada tanggal 1 Juli 2016. Pada 4Q 2017, kegiatan utama telah selesai, baik untuk lokasi darat dan lepas pantai, termasuk pemotongan pohon, pembangunan fasilitas pembongkaran massal (BOF), dan manufaktur pipa. Beberapa kegiatan lainnya telah dimulai, termasuk pekerjaan tiang pancang, menuangkan beton, tiang pancang di laut untuk dermaga LNG 2, konstruksi anjungan lepas pantai, dan anjungan pembuatan pondasi. Pada bulan Desember 2017, 1.700 orang dimobilisasi di lokasi site untuk mendukung kegiatan T3.

AMDAL yang baru disetujui pada bulan Juli 2014 dan kemudian Tangguh mengembangkan rencana lima tahun pertama untuk menjalankan komitmen jangka panjang AMDAL. Dokumen tersebut adalah TSDP (program pembangunan berkelanjutan Tangguh) yang diterbitkan pada pertengahan 2015 setelah berkonsultasi dengan Teluk Pemerintah Bintuni. Selama proses ini, BP telah memperbaiki strategi terkait pendekatan Tangguh terhadap masalah sosial, dengan fokus pada pengembangan dan optimalisasi manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adat.

Pembangunan eksternal

Program pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sedang berkembang, sebagai bagian dari percepatan program pembangunan, yang dipimpin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dalam dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni fokus pada jalan dan fasilitas umum. Tidak ada kemajuan mengenai rencana pemerintah dalam pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut, setelah diumumkan pada tahun 2013.

Pada bagian politik, bulan Juni 2017, Bupati Teluk Bintuni yang baru terpilih telah menunjuk kabinet barunya, diikuti pada bulan September 2017 dengan diangkatnya kepala daerah yang baru, satu tahun setelah bupati diresmikan pada bulan Juli 2016. Tidak adanya Dukungan pemerintah selama hampir setahun telah menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan penyampaian program di Tangguh.

Euforia otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia diikuti oleh meningkatnya permintaan untuk pembangunan baru di kabupaten dan desa, termasuk di Papua Barat. Pada tahun 2017, empat kabupaten baru didirikan di Kabupaten Bintuni, yaitu Taroy, Yakora, Moskona Utara Jauh, dan Bintuni Timur, sehingga jumlah total saat ini adalah 28 kabupaten. Tangguh terus mengelola hubungannya dengan semua pemangku kepentingan utama, terutama di kabupaten dan desa, melalui tim hubungan masyarakat.

Pada tingkat tinggi, 42 anggota baru Majelis Rakyat Papua Barat (MRP) diresmikan pada 22 November. Ada harapan tinggi bahwa MRP baru akan mempercepat musyawarah berbagai kunci undang-undang, termasuk undang-undang khusus tentang pembagian hasil Minyak dan Gas Bumi (Perdatus DBH) sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan klaim kompensasi adat dalam operasi hulu minyak dan gas di propinsi.

Ketegangan keamanan di wilayah Papua, termasuk di Papua Barat, telah meningkat setelah terjadi pertentangan dengan pasukan keamanan di sebuah operasi penambangan milik AS di provinsi tetangga. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran atas investasi asing di Indonesia.

Kunjungan dan rekomendasi TIAP

Selama kunjungan yang terakhir, TIAP memusatkan perhatian utamanya pada keamanan dan hak asasi manusia, serta tata kelola dan pengelolaan pendapatan. TIAP juga mempertimbangkan topik-topik lain yang memiliki dampak tidak langsung terhadap keamanan. Ini juga mencakup program sosial Tangguh, ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat Papua, pengadaan, lingkungan, hubungan pemerintahan dan urusan publik.

Tanggapan formal BP terhadap rekomendasi TIAP adalah sebagai berikut.

A. Pemerintahan dan advokasi

1. Rekomendasi TIAP: Melanjutkan dukungan untuk pemerintahan daerah seharusnya tidak ditunda; dukungan harus diperluas. Dukungan harus didiskusikan dengan Gubernur untuk membantu Gubernur dan DPRD dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan komitmen Tangguh.

Tanggapan BP: *Setuju. Kami telah mengembangkan sebuah kontrak dan memberikannya kepada organisasi non-pemerintah nasional, Kemitraan, sebagai mitra pelaksana kami untuk program pemerintahan. Kami akan terus bekerja sama dengan Bupati dan Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program yang memiliki tujuan dan aktif.*

2. Rekomendasi TIAP: Upaya hubungan pemerintah yang lebih aktif di Pemerintah Indonesia yang lebih tinggi harus dilakukan. Komunikasi harus ditingkatkan antara manajemen senior BP Indonesia dan kantor Presiden dan Wakil Presiden, serta menteri koordinator dengan yurisdiksi atas Tangguh. Kantor pejabat tinggi ini harus terus diinformasikan tentang pentingnya menyelesaikan penundaan dan perselisihan lokal, dan meminta untuk melakukan intervensi jika memungkinkan.

Tanggapan BP: *Setuju. Kami akan terus memperbarui informasi kepada pemangku kepentingan utama di tingkat nasional mengenai pengembangan Kilang 3 Tangguh dan komitmen BP untuk para pemangku kepentingan nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan tenaga kerja dan pelayanan.*

3. Rekomendasi TIAP: Upaya harus diperbaharui dalam menjadwalkan ulang kunjungan Presiden ke Tangguh yang sempat dibatalkan. Sebelum berkunjung, BP harus berusaha untuk mencari isu-isu penting yang berkaitan dengan Tangguh masuk ke dalam agenda Presiden pada kunjungan ke Papua Barat mendatang. Selanjutnya, BP harus mendorong dan memfasilitasi pertemuan rutin dengan pejabat penting dari Pemerintah Indonesia dengan Gubernur dan Bupati untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi TEP.

Tanggapan BP: *Keterlibatan dengan kantor Presiden merupakan bagian dari upaya manajemen hubungan kami untuk memastikan bahwa pejabat tinggi pemerintah telah sepenuhnya diperbaharui dalam proyek ini. Kami akan menilai kemungkinan kunjungan orang penting (VIP) jika sedang dalam pelayanan pengiriman proyek.*

4. Rekomendasi TIAP: Grup CEO, pada kunjungan berikutnya ke Indonesia, harus menyampaikan undangan kepada Presiden untuk bergabung dalam kunjungannya ke Tangguh. Untuk memberikan insentif lebih lanjut bagi Presiden agar mengunjungi Teluk Bintuni dan Tangguh, BP harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan pemimpin lokal untuk mengatasi kendala sehingga Presiden dapat mengumumkan tonggak sejarah dalam program sosial yang berkaitan dengan Tangguh, seperti perumahan Pantai Utara atau listrik. Hal ini akan memungkinkan Presiden untuk menyoroti hubungan antara Tangguh dan program sosial baru untuk masyarakat asli Papua.

Tanggapan BP : *Kepala eksekutif BP Bob Dudley menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi Tangguh dengan surat resmi sebelum FID pada tahun 2016. Mengenai pengelolaan masalah sosial yang dihadapi Tangguh, seperti perumahan Pantai Utara dan listrik, kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PLN sehingga kedua kegiatan tersebut bisa diimplementasi tanpa penundaan lebih lanjut.*

B. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

1. Rekomendasi TIAP: Upaya yang lebih besar harus dilakukan dan dipertahankan untuk merekrut, melatih dan mempromosikan masyarakat Papua jika komitmen AMDAL tentang tenaga kerja Papua pada tahun 2029 harus dipenuhi.

Tanggapan BP: *Setuju. Saat ini kami memiliki Program Magang Teknisi, yang dimulai pada tahun 2016, dimana kami mempekerjakan pekerja magang dan melatih mereka melalui program pelatihan tiga tahun. Setelah itu, peserta magang yang sukses akan dipekerjakan sebagai teknisi operasi atau pemeliharaan untuk mendukung ketiga kilang tersebut. Selain itu, kami juga akan meninjau kontrak yang ada dan yang baru untuk memastikan bahwa kami terus meningkatkan target kami untuk masyarakat Papua yang bekerja di semua tingkat keahlian. Kami juga akan meninjau mengenai konsekuensi ketidaksesuaian secara hukum. Pemantauan akan dibahas secara rutin dalam rapat presiden regional, yang dihadiri oleh semua wakil presiden. Sebagai tambahan, kami telah mengenalkan program Tangguh Emerging Leaders untuk mengarahkan masyarakat Papua yang memiliki potensi melalui proses tinjauan bakat. Wakil presiden (VP) sumber daya manusia untuk Asia Pasifik adalah koordinator dan bekerja sama dengan VP Operasi, Asia Pasifik, dan presiden regional kami untuk memajukan upaya ini. BP memprakarsai beberapa program dengan universitas lokal di Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan industri minyak dan gas kepada siswa dan, khususnya menyoroti peluang pengembangan.*

2. Rekomendasi TIAP: Program magang masyarakat Papua menunjukkan harapan besar untuk melatih pekerja terampil. BP harus tetap berkomitmen selama posisi untuk lulusan tersebut tetap tersedia. Berdasarkan tingkat atrisi yang tidak dapat dihindari, BP juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah rekrutmen yang masuk kelas awal.

Tanggapan BP: *Program magang diciptakan untuk mempercepat usaha kami dalam memenuhi komitmen pekerja Papua sebesar 85% pada tahun 2029, terutama untuk pekerja terampil, untuk operasi Tangguh. Jumlah rekrutmen dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi Tangguh.*

3. Rekomendasi TIAP: BP harus meningkatkan kualifikasi perekrutan masyarakat Papua yang berpengalaman untuk mengisi posisi yang lebih senior. Paling tidak, BP harus meningkatkan pemberitahuan publik tentang lowongan pekerjaan di universitas Papua dan pasar kerja lainnya di Papua melalui iklan atau rekrutmen langsung di lokasi. BP harus memberi tahu semua kesempatan kerja kepada karyawan Papua, agar mereka mendaftar sebagai perekrut dan meningkatkan jaringan calon pelamar. Selanjutnya, BP harus menyewa konsultan ketenagakerjaan, dengan pengalaman di bidang tersebut, untuk mencari masyarakat Papua yang berbakat dan berkualitas.

Tanggapan BP: *Setuju. Kami akan terus mencari dan merekrut masyarakat Papua yang berbakat sesuai kebutuhan operasi kami dan untuk mengakomodasi rencana suksesi yang tepat di dalam organisasi.*

4. Rekomendasi TIAP: Manajemen senior BP harus terus bertemu dan bertukar pandangan dengan Komite Tenaga Kerja Papua secara teratur. Kelompok ini menyediakan mekanisme komunikasi yang bermanfaat dan terorganisir bagi tenaga kerja Papua untuk menyampaikan permasalahan dan keprihatinan atau menyarankan gagasan mengenai pengembangan karir dan peluang bagi tenaga kerja Papua.

Tanggapan BP: *Setuju. Manajemen senior bertemu dengan komite secara teratur selama kunjungannya ke Tangguh.*

5. Rekomendasi TIAP: Manajemen senior juga harus terus mendorong semua manajer di Tangguh untuk membimbing tenaga kerja Papua yang meminta bimbingan.

Tanggapan BP: *Setuju. Manajemen senior akan melanjutkan upaya mereka dalam membimbing tenaga kerja Papua.*

6. Rekomendasi TIAP: Tenaga kerja Papua yang berkualitas harus diberi tahu tentang pembukaan apa pun yang muncul di Jakarta dan diberi kesempatan yang sama untuk mengisi posisi tersebut.

Tanggapan BP: *Setuju. Pengumuman lowongan pekerjaan dapat diakses oleh publik maupun seluruh karyawan. Dalam kasus tertentu, pemimpin tim juga dapat mendekati individu yang mereka rasa sesuai dengan persyaratan.*

7. Rekomendasi TIAP: Untuk setiap layanan atau produk Tangguh yang dikontrak, BP harus memasukkan hak untuk memberlakukan sanksi keuangan kepada kontraktor ke dalam kontrak tersebut jika tidak memenuhi persyaratan perekrutan masyarakat Papua yang telah disepakati sebelumnya, dan harus menerapkan persyaratan ini.

Tanggapan BP: *Setuju. Sanksi finansial telah diterapkan untuk semua kontrak baru sejak tahun 2016.*

8. Rekomendasi TIAP: Bagi TEP, BP telah memberlakukan kewajiban kontrak pada kontraktor CSTS untuk memenuhi tujuan perekrutan Papua. Persyaratan ini harus dipantau oleh BP dan diberlakukan secara ketat, mengingat pentingnya persyaratan tersebut dan jangka waktu yang singkat. Jika langkah perekrutan atau pelatihan tambahan diperlukan, BP harus berusaha keras agar hal ini dapat segera dilembagakan, karena waktu persiapan sangat penting dalam memenuhi persyaratan dan kepatuhan akan jauh lebih baik daripada membayar denda.

Tanggapan BP: *Setuju. Kami sudah melakukan tindakan atas rekomendasi ini dengan komite lokal konten BP, yang secara rutin memantau semua kewajiban kontrak dan kemajuan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disepakati. Sanksi akan dikenakan jika kontraktor tidak memenuhi kewajibannya.*

C. Lingkungan dan pemeliharaan

1. Rekomendasi TIAP: Kinerja pengelolaan lingkungan BP untuk operasi Tangguh sangat baik. Untuk memastikan kepatuhan lingkungan Proyek Pengembangan Tangguh, BP harus menjaga pengawasan dan kewaspadaan yang ketat serta berkoordinasi dengan kontraktor. Ini harus mencakup pertemuan mingguan untuk menangani potensi dampak lingkungan dari semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan, serta mekanisme untuk menanggapi setiap masalah yang timbul dengan cepat.

Tanggapan BP: *Tim lingkungan TEP BP di lokasi tersebut bekerja sama dengan kontraktor untuk mengawasi operasi mereka. Tim ini dipimpin oleh manajer HSE TEP dan mereka memastikan bahwa semua persyaratan lingkungan diterapkan sesuai dengan kontrak EPC dan komitmen AMDAL. Jaminan kinerja lingkungan meliputi pertemuan mingguan, inspeksi dan pemantauan berkala. Selain itu, tim melakukan investigasi dan menanggapi semua insiden lingkungan. Tim juga berkoordinasi dengan tim operasi lingkungan untuk Tangguh memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan lingkungan.*

2. Rekomendasi TIAP: BP harus terus menyadari pentingnya penampilan fasilitasnya sebagai pengingat atas kebanggaan dan standar setiap karyawannya. BP seharusnya tidak mentolerir fasilitas, yang menjadi tanggung jawabnya atau lokasi konstruksi TEP pada umumnya, yang mencerminkan pemeliharaan yang kurang baik atau buruk.

Tanggapan BP: *Keselamatan dan pemeliharaan adalah prioritas utama kami dalam memastikan operasi yang aman dan andal. Pemeliharaan semua fasilitas memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan kebersihan, dengan inspeksi pembersihan reguler sesuai dengan praktik industri umum. Kami memahami bahwa pada tahap konstruksi kebersihan beberapa fasilitas akan terpengaruh karena kegiatan proyek. Namun, mereka tetap memenuhi standar lingkungan.*

D. Keamanan

1. Rekomendasi TIAP: Mengingat potensi konsekuensi dari serangan *cyber* yang sukses dan evolusi *hacking* global yang terus berlanjut, BP harus terus memberlakukan dan menerapkan prosedur yang ketat dan canggih, dan harus memeriksanya secara teratur. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberi pelatihan keamanan online secara reguler.

Tanggapan BP: Kebijakan keamanan cyber BP untuk tim manajemen mencakup dua persyaratan utama yaitu (1) Manajemen harus mendorong perilaku keamanan cyber yang sesuai dalam bisnis mereka. (2) Mereka harus mengelola risiko cyber seperti risiko lainnya terhadap bisnis mereka.

BP memiliki perilaku dan program kesadaran yang mapan, termasuk materi pelatihan. Ekspektasi perilaku dasar ditetapkan dalam kebijakan Protecting Our Information (POI). Kebijakan tersebut mendefinisikan enam perilaku penting. Kampanye kesadaran dilakukan secara teratur melalui jaringan duta cyber lokal dan diukur melalui Barometer Cyber, sebuah dasbor KPI. BP mengadakan Pekan Cyber tahunan agar fokus pada ancaman-ancaman cyber.

2. Rekomendasi TIAP: Sistem operasi dan produksi Tangguh harus benar-benar terputus dari internet, dan akses harus dibatasi pada personil Tangguh yang berwenang dan memiliki banyak lapisan keamanan. TIAP juga sangat mendukung audit keamanan cyber dua tahunan oleh BP Group.

Tanggapan BP: BP membedakan sistem operasi dan produksi sebagai Process Control Network (PCN), yang benar-benar terputus dari internet dan dipisahkan dari jaringan BP (BP1) oleh Process Information Network (PIN). Kontrol keamanan informasi untuk sistem otomasi didokumentasikan dalam BP Practice, Sistem Otomasi Keamanan Cyber 3.5-0001 dan Group Practice 30-60, Sistem Otomasi Keamanan & Integritas Digital.

Audit keamanan cyber dua tahunan yang dilakukan grup BP didasari oleh BP and Group Practice di atas.

3. Rekomendasi TIAP: Sangat penting bahwa Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS dilaksanakan secara sepenuhnya dan benar, terutama karena ini diberlakukan di antara semua subkontraktor. BP harus menggunakan proses koordinasi dan verifikasi dari rencana keamanan untuk mengawasi semua elemen keamanan TEP dan menuntut agar setiap aspek rencana keamanan dapat berjalan efektif. Sebagai tambahan, ketika mobilisasi para pekerja meningkat, BP harus bersikeras bahwa setiap kekurangan yang dirasakan dapat dikoreksi.

Tanggapan BP: Setuju. Mekanisme untuk mengelola Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS telah diterapkan di tingkat kepemimpinan di Tangguh dan Jakarta, yang memungkinkan masalah-masalah kinerja dapat segera diidentifikasi, dibahas dan rencana perbaikan dapat disetujui.

4. Rekomendasi TIAP: Pelatihan lanjutan untuk para penjaga terkait *Behavior Profiling and Surveillance Detection & Counter Measures* harus dibuat permanen. Para penjaga yang terlatih dalam keterampilan ini harus ditugaskan secara teratur untuk bertugas di kampung-kampung terdekat. Pelatihan ini harus diberikan kepada penjaga selama jam kerja mereka, dan dipandang sebagai bagian dari tugas mereka yang dibutuhkan, reguler dan penting. Penjaga tambahan harus dipekerjakan jika diperlukan untuk mengakomodasi persyaratan pelatihan ini.

Tanggapan BP: Setuju. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi petugas keamanan Tangguh merupakan prioritas yang terus dilakukan. Mereka telah dilatih dengan keterampilan keamanan tingkat tinggi di luar apa yang dijamin oleh peraturan pemerintah yang berlaku, dan rencana untuk pelatihan taktis tambahan telah disediakan. Penilaian terus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pelatihan dilaksanakan dengan cara yang paling efisien dan efektif.

5. Rekomendasi TIAP: BP harus meninjau ulang pelatihan yang diberikan sejauh ini untuk para penjaga keamanan untuk TEP, dan menentukan apakah pelatihan tersebut memberikan tingkat pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan di bawah ICBS dan JUKLAP. Jika tidak, modifikasi pelatihan harus dilakukan.

Tanggapan BP: Setuju. BP bekerja sama dengan kontraktor utama TEP untuk memastikan bahwa petugas keamanan yang terakhir dilatih dengan standar yang sama dengan standar BP. Ada upaya yang disengaja untuk memastikan bahwa budaya 'satu tim' Tangguh, dalam konteks kemitraan keamanan antara kedua organisasi tersebut, diterjemahkan ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti yang mencakup transfer pengetahuan, pembinaan, dan pelatihan bersama, pelatihan dan latihan.

6. Rekomendasi TIAP: BP harus yakin bahwa upaya CSTS cukup memadai dalam mendeteksi kemungkinan ancaman keamanan dari karyawan CSTS dan semua subkontraktornya. BP harus meninjau semua proses pemeriksaan untuk meminimalkan kemungkinan individu yang memiliki potensi ancaman dipekerjakan. Kode Etik BP harus diberlakukan secara ketat dan BP harus segera diberitahu tentang adanya pelanggaran atau perilaku lain oleh karyawan yang dapat menimbulkan ancaman. Karyawan harus diberi tahu bahwa kamar dan barang pribadi mereka akan dikenakan inspeksi mendadak oleh petugas keamanan untuk mencegah penyelundupan atau bahan-bahan radikal. Setiap hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran perilaku harus dilakukan secara bersamaan oleh CSTS dan BP.

Tanggapan BP: Setuju. Mekanisme untuk kinerja manajemen Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS telah dilakukan di tingkat Tangguh dan tingkat kepemimpinan di Jakarta yang memungkinkan permasalahan kinerja segera diidentifikasi, dibahas dan rencana perbaikan disetujui. Lebih khusus lagi, fokus perhatian diberikan kepada proses pemeriksaan latar belakang, inspeksi personil, dan insiden / pelanggaran keamanan ditindaklanjuti secara menyeluruh, sambil memastikan penerapan kebijakan tindakan disipliner di seluruh wilayah.

7. Rekomendasi TIAP: Meningkatkan sesi pertemuan intelijen sangat penting untuk mendeteksi dan peringatan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Keamanan Tangguh harus terus mendorong masyarakat setempat untuk berbagi informasi dengan BP tentang pendatang baru dan kegiatan yang tidak biasa atau tertutup, termasuk kesadaran akan kegiatan di rumah ibadah, untuk mendeteksi perilaku mengancam atau menghasut yang berkaitan dengan Tangguh.

Tanggapan BP: Setuju. BP terus memanfaatkan hubungan positif dan konstruktif dengan pihak berwenang di tingkat lokal, regional dan nasional mengenai pertemuan dan pembagian intelijen. ICBS tetap menjadi sarana utama dimana BP bekerja sama dengan masyarakat dan tenaga kerja untuk mendeteksi, melaporkan dan menanggapi potensi gangguan dan / atau ancaman keamanan di daerah dan sekitar Tangguh.

8. Rekomendasi TIAP: Perimeter keamanan harus ditingkatkan. Langkah yang lebih efektif dapat dimanfaatkan agar lebih aman dan memantau garis perbatasan. BP harus mempertimbangkan pagar yang lebih baik, serta meningkatkan penggunaan CCTV, *drone* dan patroli dilakukan setiap hari.

Tanggapan BP: Setuju. Upaya akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan perimeter itu kuat dengan maksud untuk melakukan perbaikan dalam kaitannya dengan personal, proses keamanan dan penggunaan teknologi. Rencana peningkatan keamanan telah hadir dan proyek berhasil membawa perbaikan pada pelatihan keamanan staf, proses yang mereka ikuti serta teknologi untuk membantu mereka. Tangguh telah memulai operasi keamanan drone yang menyediakan pemantauan rutin aset dan operasi penting.

9. Rekomendasi TIAP: Keamanan laut harus ditingkatkan lebih lanjut. Selama konstruksi, keamanan CSTS memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan menjamin keselamatan semua wilayah konstruksi di area pesisir dan lepas pantai. Namun karena akan ada begitu banyak lalu lintas di sekitar lokasi LNG selama konstruksi, penting bagi BP untuk dapat mengidentifikasi semua kapal di dekat dermaga atau berbagai anjungan lain sebelum mereka tiba. Berkoordinasi dengan CSTS, memanfaatkan radio atau komunikasi lainnya, serta CCTV, radar, lidar, atau teknologi lain yang tersedia, BP harus memfasilitasi peringatan dini tentang aktivitas laut yang memiliki intensitas buruk. Selain itu, komunikasi reguler dengan pangkalan Angkatan Laut di Sorong harus dilembagakan, melalui jalur yang tepat, terutama untuk mengkoordinasikan tanggap darurat. Selanjutnya, BP harus menjajaki kemungkinan potensi peningkatan kapasitas unit patroli genggam bersama (*joint mobile patrol*/"JMP") dengan polisi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan penangkapan ikan tradisional.

Tanggapan BP: Setuju. BP telah bekerja sama dengan CSTS untuk memperkuat keamanan laut. Kemampuan keamanan patroli laut telah meningkat secara signifikan melalui penyebaran kapal patroli CSTS yang bekerja sama dengan BP di sepanjang garis pantai Tangguh. Selain itu, BP, dengan bantuan otoritas lokal, telah meningkatkan upaya sosialisasi undang-undang zona pengecualian laut ke masyarakat sekitar. BP memiliki hubungan positif dan konstruktif dengan pangkalan angkatan laut di Sorong, serta pos angkatan laut di Bintuni, dan bertujuan untuk memperkuat hubungan lebih lanjut melalui berbagai cara. Terakhir, JMP, yang ada sejak operasi di Tangguh dimulai dan berlokasi di dekatnya, dilibatkan dalam latihan rutin dan latihan dengan pasukan penjaga keamanan Tangguh untuk memastikan kesiapan tanggap darurat.

10. Rekomendasi TIAP: Prosedur respon cepat di lokasi untuk skenario ancaman keamanan tingkat tinggi harus dapat dibedakan secara jelas dari prosedur yang digunakan untuk kebakaran, ledakan atau keadaan darurat keselamatan lainnya, dan tindakan yang direkomendasikan untuk personel harus mencerminkan pose ancaman yang berbeda.

Tanggapan BP: Setuju. Pedoman respon keamanan yang spesifik diberlakukan dan diinformasikan kepada semua anggota tenaga kerja Tangguh. Latihan rutin dilakukan untuk terus memvalidasi kesiapan Tangguh dalam menanggapi berbagai skenario keamanan. Sirene keamanan digunakan untuk mendukung aktivasi dan de-aktivasi proses keamanan tanggap darurat.

11. Rekomendasi TIAP: Tindakan mitigasi kendaraan (Hostile Vehicle Mitigation "HVM") harus ditingkatkan. Mengamankan penyimpanan kendaraan, kunci, atau perangkat pengapian lainnya, sangatlah penting. BP juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan kepraktisan memasang gubernur atau perangkat lain, kecuali kendaraan darurat, yang membatasi kecepatan tertinggi mereka dengan kecepatan rendah yang dibutuhkan oleh kendaraan di lokasi.

Tanggapan BP: Setuju. Penilaian keamanan untuk risiko kendaraan yang berseteru sedang berlangsung. Hasil penilaian ini akan menentukan rencana perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi risiko serendah mungkin.

12. Rekomendasi TIAP: Pelatihan tahunan bersama dengan polisi dan TNI yang dipersyaratkan dalam JUKLAP harus diadakan setiap tahun, dan harus memvalidasi kemampuan BP untuk mengurangi ancaman keamanan tingkat tinggi. Latihan tersebut harus melatih tanggapan yang terkoordinasi, melibatkan keamanan Tangguh dan CSTS, serta polisi dan TNI. Ini harus dijadikan tambahan dalam latihan tahunan yang diperlukan dan dilakukan tanpa keamanan publik dalam rencana keamanan CSTS.

Tanggapan BP: Setuju. Semua upaya akan dibuat untuk memastikan bahwa pelatihan gabungan secara tahunan tetap dilakukan. Pelatihan tersebut terus memvalidasi kesiapan Tangguh untuk mengelola berbagai skenario ancaman, termasuk kekerasan di tempat kerja, serangan bersenjata, penyanderaan, dan kerusuhan dan kekerasan kerja sipil.

13. Rekomendasi TIAP: BP harus mendukung konferensi reguler yang dipimpin oleh SKKMigas di antara kontraktor minyak dan gas dan profesional keamanan untuk membandingkan ancaman keamanan dan prosedur penanganan dan berbagi praktik.

Tanggapan BP: Setuju. BP adalah peserta reguler konferensi keamanan yang diadakan atau didukung oleh SKK Migas, serta rapat bulanan jaringan manajer keamanan. Opini BP sangat dicari oleh rekan industri dan instansi pemerintah lainnya mengenai pelajaran yang dipetik di ICBS dan VPSHR. Selain itu, BP secara aktif melibatkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk mencari perspektif tentang bagaimana hal itu dapat terus memperkuat upaya terhadap ancaman keamanan tingkat tinggi.

14. Rekomendasi TIAP: Kapasitas keamanan pribadi Tangguh harus ditingkatkan dengan senjata yang lebih efektif untuk menggagalkan serangan jika tidak mengatasi serangan bersenjata. Senjata tidak mematikan, seperti senapan gel lada, semprotan merica, peluru karet, senjata api dan mungkin perangkat lain harus tersedia di tingkat elite penjaga senior yang telah menunjukkan kapasitas mereka dan telah dilatih dengan seksama dalam penggunaannya. BP harus bekerja sama dengan kontraktor keamanan untuk membentuk kader penjaga keamanan elit, yang bisa menjadi promosi bagi para penjaga dengan kinerja terbaik. Jika kontrak yang ada tidak mengizinkan peningkatan kapasitas atau struktur pasukan keamanan ini, maka kontrak tersebut harus didiskusikan dengan kontraktor keamanan sebagai amandemen terhadap kontrak yang ada.

Tanggapan BP: Setuju. Staf keamanan Tangguh dilengkapi dengan tindakan keamanan tambahan dan kapabilitas untuk merespons ancaman keamanan tingkat tinggi. Sejalan dengan itu, unit pasukan penjaga elit Tangguh yang didirikan pada tahun 2012, secara rutin dilatih dan melakukan pelatihan dengan polisi di dekatnya, JMP.

E. Perumahan Pesisir Pantai Utara

1. Rekomendasi TIAP: BP harus secara aktif terlibat dengan pejabat daerah dan nasional dalam upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. BP harus melibatkan pejabat senior Pemerintah Indonesia, termasuk jika memungkinkan Kantor Presiden, meminta bantuan mereka untuk menengahi dan menegosiasikan solusi yang cepat. BP dapat mengusulkan alternatif, seperti menerapkan program secara bertahap, yang memungkinkan diskusi mengenai cakupan program yang tepat saat konstruksi berlangsung.

2. Rekomendasi TIAP: Jika penundaan berlanjut sampai 2018, BP harus meminta otoritas dari SKKMigas untuk mendanai pembangunan beberapa perbaikan infrastruktur yang dipilih oleh masing-masing desa, seperti jembatan baru, bangunan umum atau jalan setapak, sebagai demonstrasi niat baik BP dan sebagai bentuk kompensasi untuk penundaan.

3. Rekomendasi TIAP: Setiap pelaksanaan program dimulai, BP harus berusaha keras untuk mempercepat jalur waktu demi menyelesaikan setidaknya fase yang direncanakan pada tahun 2020, bertepatan dengan pembukaan Kilang 3.

Tanggapan BP 1-3: Kemajuan signifikan telah dicapai pada proyek NSH dalam dua bulan terakhir, mengikuti kunjungan TIAP pada bulan September. Bupati Teluk Bintuni mengeluarkan surat yang mengizinkan dimulainya kembali proyek NSH pada tanggal 6 Desember 2017. Selain itu, BP dan pemerintah daerah Bintuni menandatangani amandemen kesepakatan kerjasama untuk proyek NSH agar mencerminkan fase rehabilitasi (konstruksi) multi-tahun yang baru, yang tetap sesuai dengan jadwal TEP, serta dimasukkannya Taroi sebagai distrik baru untuk pembangunan 2018. Pada bulan Desember 2017, pemerintah daerah Teluk Bintuni memulai proses tender pembangunan rumah di tiga distrik (Weriagar, Tomu dan Taroi). Pembangunan rumah tersebut akan selesai pada 2020, sesuai kesepakatan kerja sama.

F. Listrik

1. Rekomendasi TIAP: BP harus bekerja sama dengan para pemimpin di tingkat nasional, termasuk SKKMigas, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ("KPPIP") dan yang lainnya untuk mendorong PLN membuat kemajuan dalam tujuan penting ini. BP juga harus berusaha melibatkan Presiden dan penasihatnya dari Papua dalam usaha ini.

Tanggapan BP: Setuju. Kami akan terus melibatkan pemangku kepentingan utama di tingkat nasional untuk terus memastikan implementasi atas program kelistrikan oleh PLN.

2. Rekomendasi TIAP: BP harus meminta wewenang untuk meningkatkan pasokan pembangkit listrik tenaga diesel untuk Babo, sampai PLN memperluas daya berbasis grid dari Tangguh ke Babo dan kampung-kampung sekitarnya. Hal ini juga harus meminta otoritas untuk menyediakan lampu solar ke setiap rumah tangga di kampung-kampung tanpa listrik, sehingga 'tetangga' Tangguh dapat memiliki cahaya yang dapat diandalkan.

Tanggapan BP: Setuju. Kami melanjutkan perjanjian kami dengan PLN Teluk Bintuni untuk memenuhi permintaan listrik di Babo. Pada saat yang bersamaan, kami juga menyediakan generator tambahan untuk mengoptimalkan pasokan listrik bagi masyarakat Babo.

G. Gas untuk listrik

1. Rekomendasi TIAP: BP harus bekerja lebih aktif dengan Gubernur, pimpinan DPRD, dan pejabat di Jakarta untuk memastikan mereka memahami secara penuh kebutuhan akan tindakan cepat untuk membentuk dan melaksanakan BUMD, yang merupakan prasyarat dalam memulai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kekuatan berbasis gas.

Tanggapan BP: Setuju. BUMD Baru (PT Papua Global Energi) telah dibentuk, namun, Gubernur Papua Barat memutuskan untuk menggunakan BUMD lama (PT Papua Doberai Mandiri atau 'Padoma') demi kesederhanaan, karena BUMD baru memiliki persyaratan tambahan dari parlemen lokal yang tidak diperlukan. SKK Migas juga telah menulis surat kepada BP agar lanjut dengan Padoma. Langkah selanjutnya bagi Padoma adalah mencari mitra bisnis, melakukan uji kelayakan, melaksanakan MOU, dan kemudian, sebelum kesepakatan, menerapkan perjanjian jual beli. BP dan SKK Migas, berkoordinasi dengan KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dan PLN, akan terus mendukung program gas untuk listrik di Papua Barat.

H. Pembangunan sosial dan masyarakat

Kesehatan

1. Rekomendasi TIAP: BP harus terus mendukung program yang mengurangi morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan diare, TBC dan HIV/AIDS. Upaya ini harus terus didukung secara aktif dengan tujuan untuk meningkatkan perawatan kesehatan Teluk Bintuni ke standar Indonesia.

Tanggapan BP: Setuju. Kegiatan program kesehatan masyarakat Tangguh, mendukung pemerintah daerah untuk terus memberantas TBC, HIV/AIDS dan diare, terutama di kampung-kampung di sekitar proyek tersebut, agar sesuai dengan pedoman nasional. Mengenai HIV/AIDS, kami mendirikan 18 layanan konseling dan pemeriksaan sukarela (VCT) di wilayah Teluk Bintuni untuk memberikan konseling dan pengujian gratis bagi mereka yang berisiko. Penyedia layanan kesehatan ini mendapat pelatihan standar dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai bagian dari kegiatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni. HIV di Tanah Papua dianggap sebagai epidemi populasi umum, program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap pengobatan HIV dan ARV (antiretroviral) untuk masyarakat umum. Pada tahun 2017, lebih dari 6.600 orang di seluruh wilayah Teluk Bintuni berpartisipasi dalam tes HIV termasuk ibu hamil, dan 54 orang yang didiagnosis HIV positif dirujuk untuk pengobatan ARV.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, program ini memfasilitasi pengembangan kapasitas petugas kesehatan di layanan TBC (Puskesmas dan RSUD Bintuni). Program ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan merekrut kader TBC di kampung-kampung untuk mengunjungi penderita TBC dan melakukan penyaringan di Puskesmas setempat. Selain itu, program ini melakukan proyek percontohan di beberapa kampung yang memiliki prevalensi TBC tingkat tinggi pada bulan April 2017. Ini merupakan rekomendasi program nasional untuk optimalisasi kasus intensif yaitu mencari orang yang berisiko terkena TBC. Dan, awareness session bulanan tentang gaya hidup sehat yang berfokus pada malaria, TBC dan HIV/AIDS menargetkan masyarakat di kampung-kampung di sekitar proyek Tangguh. Rata-rata, lebih dari 450 orang berpartisipasi setiap bulannya.

Mata pencaharian dan pengembangan usaha

2. Rekomendasi TIAP: BP harus bekerja dengan Indocater dan koordinator kampung untuk mencapai komitmen AMDAL TEP-nya yaitu mendapatkan 10% kebutuhan pangan segar selama konstruksi TEP dan 65% pasca konstruksi. Peningkatan produksi oleh koperasi ini mungkin memerlukan perluasan *stocking point* dan / atau *pick-up* yang lebih sering.

Tanggapan BP: Setuju. BP telah memfasilitasi komunikasi antara perusahaan catering di Site dan pengelolaan koperasi/tempat penimbunan, dengan memperhatikan pesanan komoditas di masa mendatang, sehingga petani dan nelayan dapat melakukan persiapan dan menyusun jadwal panen yang lebih baik untuk menghindari produksi yang berlebihan. Komunikasi semacam itu dilakukan secara berkala melalui mentor teknis kami di kampung, yang berlokasi di koperasi/tempat penimbunan. Jika tidak ada perubahan dalam strategi operasional mengenai pelaksanaan penjadwalan, layanan catering Tangguh akan terus mengumpulkan barang-barang komoditas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontraknya dengan koperasi.

3. Rekomendasi TIAP: BP harus melembagakan pemantauan secara cermat terhadap pengadaan lokal oleh kontraktor untuk memastikan bahwa komitmen AMDAL-nya telah dipenuhi dan meminta agar setiap kekurangan segera ditangani. Jika tidak dikoreksi, BP harus mengajukan denda berdasarkan kontrak yang bisa diinvestasikan di fasilitas dan perlengkapan koperasi.

Tanggapan BP: BP akan memperkuat upaya kinerja secara berkala untuk memantau kinerja kontraktor dan memastikan bahwa komitmen kontraktual disampaikan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati.

Jika kontraktor gagal dalam menyampaikan komitmennya, BP akan membentuk rencana tindakan kuratif dan, jika perlu, segera mengambil tindakan untuk meminimalisir kekurangan. Rencana kuratif juga bisa mencakup pelaksanaan hukuman, yang akan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

4. Rekomendasi TIAP: Kelompok Pengadaan dan Pengadaan Rantai Pasokan BP harus menggali peluang untuk produk atau layanan tambahan yang dapat diberikan oleh masyarakat lokal yang ahli, perusahaan masyarakat asli yang terlatih. Sejauh ini, satu-satunya kontrak yang telah diberikan kepada peserta adalah koperasi Mayri dan Koperasi Raja Barefal untuk persediaan alat tulis dan Subitu Kreasi Busana untuk seragam.

Tanggapan BP: Setuju. Tim BP terus menilai peluang masyarakat adat agar memungkinkan bisnis lokal terlibat dalam program rantai pasokan proyek Tangguh. Dari bulan Januari sampai Juli 2017, tujuh institusi Papua terlibat dalam bisnis Tangguh, dengan total transaksi senilai lebih dari US\$ 5,8 juta. Sejak 2006, total transaksi dengan 27 bisnis Papua untuk berbagai layanan mencapai sekitar US\$ 186 juta.

5. Rekomendasi TIAP: Bisnis asli SUBITU merupakan elemen penting pembangunan Papua. Kegagalan salah satu dari bisnis SUBITU akan berdampak buruk pada keseluruhan program pengembangan perusahaan BP. BP harus terus memelihara bisnis ini karena mereka berusaha keras untuk menjadikan perusahaannya menguntungkan.

Tanggapan BP: Setuju. Tim IEDP akan terus memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk mendukung bisnis SUBITU dan melengkapi mereka dengan keterampilan agar dapat berkembang melampaui pasar Tangguh dan Bintuni dan Papua Barat. BP juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah di kabupaten dan di tingkat provinsi agar terus mendapatkan dukungan

Kompensasi Adat

6. Rekomendasi TIAP: BP harus terus menolak usulan apapun bahwa BP harus membayar klaim adat yang diakui oleh pemerintah, dan termasuk pembayaran dalam *cost recovery*. Jika Pemerintah Indonesia menuntut agar BP membayar klaim semacam itu, maka uang tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai atau setara. Jika pembayarannya harus melibatkan BP, maka harus sepenuhnya transparan, dan berbentuk dana untuk program atau program tertentu yang menguntungkan masyarakat adat.

Tanggapan BP: Setuju. Mekanisme pembayaran klaim adat telah disepakati antara SKK Migas dan ESDM. Implementasi skema ini akan dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edukasi

7. Rekomendasi TIAP: Sekolah unggulan adalah satu-satunya unsur dukungan BP yang paling penting bagi pendidikan lokal. Sudah lama tertunda. BP harus bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan mitra pendidikannya untuk membuat pembentukan satu sekolah unggulan tepat waktu di Teluk Bintuni sebagai prioritas. Sekolah harus berfungsi sepenuhnya, paling lambat, saat Kilang 3 beroperasi dimulai.

Tanggapan BP: Pengembangan sekolah unggulan sedang berlangsung. Pada tahun 2017, kegiatan ini fokus pada pengembangan konsep, yang melibatkan konsultan independen dari dua institusi. Kami sedang mengejar

setidaknya satu program sekolah unggulan di TMB pada tahun 2020. Pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dan yayasan pendidikan lokal dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan mengenai konsep sekolah unggulan. Kami juga mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti studi perbandingan mengenai bagaimana sekolah unggulan berhasil diimplementasikan di Jayapura, Provinsi Papua, dan di Tomohon, Sulawesi Utara. Tender untuk mitra pelaksana program sekolah unggulan sedang berlangsung dan kami mengharapkan kegiatan-kegiatan berlanjut untuk mendukung pengembangan sekolah unggulan di tahun 2018.

Lampiran A. Status Rekomendasi TIAP

REKOMENDASI TIAP MULAI KUNJUNGAN SEPTEMBER 2015

Status Desember 2017

Topik	Rekomendasi TIAP mulai kunjungan tahun 2015	Tanggapan BP bulan Januari 2016	Status bulan Desember 2017
Rekomendasi umum	<p>1. BP harus memberitahukan kepada para pemimpin dan masyarakat mengenai kemungkinan bahwa pengembangan Tangguh mungkin tidak akan dimulai tahun 2016.</p>	<p>Kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur mengenai rencana atau aktivitas yang akan kami lakukan di sekitar teluk, yang akan berdampak pada masyarakat. Ini sudah merupakan kebiasaan yang telah kami lakukan secara rutin untuk BP/Tangguh sejak kami masuk ke area ini di awal tahun 2000.</p> <p>Kami akan terus berkomunikasi dengan para pimpinan dan masyarakat di sekitar Operasi Tangguh dan tonggak penting proyek pengembangan Tangguh. Di dalamnya termasuk pengingat bahwa Keputusan Investasi Akhir untuk proyek pengembangan akan dilakukan di 2016.</p>	<p>Telah selesai dilakukan.</p> <p>Tangguh menjaga komunikasi tentang kemajuan TEP dengan kampung-kampung, termasuk para pemimpin suku dan masyarakat, sebagai bagian dari komitmennya terhadap transparansi. Setelah Pemerintah mengumumkan FID pada bulan Juli 2016, Tangguh melakukan pertemuan serial untuk mengenalkan masyarakat dengan proyek T3. Pertemuan tersebut terjadi di 11 lokasi dan melibatkan 45 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan lebih lanjut dilakukan di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, pada bulan Mei 2017.</p>
	<p>2. Penyediaan listrik untuk Babo dan kampung DAV lain harus segera dilanjutkan, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.</p>	<p>Pemasangan jaringan listrik di Babo dan kampung-kampung lainnya di Teluk Bintuni merupakan bagian dari program kelistrikan milik negara PLN di Bintuni. Seperti yang telah diatur dalam Kesepakatan Pembelian Produksi (<i>Supply Off-take Agreement</i>, SOA) yang ditandatangani pada tahun 2012, Tangguh berencana memasok 4+4 MW ke PLN dan tahap pertama akan diselesaikan tahun 2014.</p> <p>Kami bekerjasama dengan PLN dan akan terus mendukung PLN jika dibutuhkan, sesuai dengan SOA.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Tangguh terus berkoordinasi dengan PLN untuk implementasi program kelistrikan di Bintuni. Tangguh juga berencana menyediakan generator tambahan di Babo (500KVA) untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Penyediaan generator baru sedang berlangsung. Instalasi, <i>start up</i> dan program perawatan akan didukung oleh Tangguh. Kami menunggu persetujuan teknis untuk program ini dari SKK Migas.</p>

	<p>3. BP harus siap untuk memulai program restorasi perumahan untuk kampung-kampung di pesisir wilayah utara, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.</p>	<p>Rencana Restorasi Perumahan Pesisir Pantai Utara tetap berlangsung. Kami setuju bahwa program ini dapat mengatasi masalah kecemburuan di Pesisir Pantai Utara yang selalu ada.</p> <p>Tanggung akan mendukung proyek yang akan dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Bintuni. Kami meyakini bahwa bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam proyek ini merupakan pendekatan terbaik untuk memastikan keterlibatan masyarakat. Kami akan melanjutkan persiapan dan mempertimbangkan setiap perubahan rencana pada waktunya.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Untuk melaksanakan program tersebut, sebuah kesepakatan kerjasama telah ditandatangani oleh Bupati Teluk Bintuni dan BP Indonesia di Kota Bintuni pada akhir Desember. Kesepakatan ini menandai dimulainya tahap implementasi program perumahan pesisir Pantai Utara.</p> <p>Kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam program NSH. Pada awal Desember 2017, kepala Bupati Bintuni mengeluarkan sebuah surat yang memungkinkan untuk memulai kembali proyek NSH. BP dan pemerintah daerah Bintuni juga menandatangani amandemen kesepakatan kerjasama untuk proyek NSH agar mencerminkan fase rehabilitasi (konstruksi) multi-tahun yang baru, sesuai dengan jadwal TEP, serta dimasukkannya Taroi sebagai distrik yang baru untuk konstruksi tahun 2018. Proses tender pembangunan rumah di tiga distrik (Weriagar, Tomu dan Taroi) dimulai pada bulan Desember 2017. Pembangunan rumah dijadwalkan akan selesai pada tahun 2020, sesuai kesepakatan kerja sama.</p>
--	--	---	---

	<p>4. Komitmen BP untuk mendirikan sekolah unggulan di Teluk Bintuni bagi siswa yang paling menjanjikan seharusnya tidak ditunda lagi.</p>	<p>Setuju. Kami telah menyelesaikan penilaian kesenjangan (<i>gap assessment</i>) di Sekolah kampung Tanah Merah Baru untuk memahami lingkup dan skala yang dibutuhkan untuk memenuhi standar sekolah unggulan. Kami juga telah memasukkan aktivitas yang terkait dengan sekolah unggulan dalam aktivitas 2016 kami yang direncanakan akan memajukan program ini.</p> <p>Kami meyakini bahwa sekolah unggulan harus benar-benar sesuai dengan budaya Papua dan Bintuni. Karena itu, persiapan dan konsep awal merupakan aspek penting untuk mengembangkan sekolah unggulan. Hal ini akan dilakukan secara serius dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.</p>	<p>Sedang dalam persiapan</p> <p>Penilaian kesenjangan untuk pengembangan sekolah unggulan selesai pada awal tahun 2016 dan hasilnya telah diberikan ke pemerintah daerah. Selama tahun 2017, kami merekrut beberapa tenaga ahli untuk mengembangkan konsep-konsep andalan. Serial lokakarya dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ini melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dan yayasan lokal. Kami juga mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti studi perbandingan tentang sekolah unggulan yang berhasil diimplementasikan di Jayapura, di provinsi Papua, dan Tomohon, Sulawesi Utara. Tender untuk mitra pelaksana program tersebut sudah dimulai, dan kami mengharapkan kegiatan dapat dimulai pada tahun 2018.</p>
--	--	---	---

	<p>5. BP harus terus mendidik para pemangku kepentingan setempat bahwa ganti rugi adat harus berasal dari pembagian hasil dan bahwa itu merupakan tugas pemerintah setempat pada saat ini untuk mewujudkannya.</p>	<p>Setuju. Kami terus melakukan advokasi mengenai masalah ini dengan terus melakukan pelibatan secara formal dan informal. Kami telah bertindak proaktif dalam memberikan advokasi mengenai masalah ini dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Departemen Keuangan. Diskusi serta advokasi dengan pemerintah setempat juga terus dilaksanakan.</p> <p>Secara bersamaan, kami terus menyelenggarakan setidaknya dua lokakarya setiap tahunnya dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas pengelolaan adat dan pengelolaan pendapatan dari industri ekstraktif sebagai bagian dari Program Tata Kelola Tangguh.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BP menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai resolusi kompensasi adat.</p>
	<p>6. BP seharusnya tidak melakukan perubahan apa pun dalam kebijakan tentang transportasi pekerja lokal sampai BP berkonsultasi dengan para pekerja lokal dan pemimpin pemerintahan untuk menjajaki opsi-opsi lain.</p>	<p>Tangguh telah menunda rencana tersebut setelah berkonsultasi dengan pekerja dan masyarakat setempat. Kami tengah melakukan penilaian untuk memahami kelayakan, dampak dari perubahan ini pada pekerja dan masyarakat, serta cara mendukung rencana pemerintah setempat untuk membangun sistem taksi air.</p>	<p>Telah selesai dilakukan</p> <p>Tangguh mempertahankan kebijakan transportasi untuk pekerja yang tinggal di kampung-kampung sekitar.</p>

	<p>7. Perekrutan orang Papua yang terampil, serta retensi dan promosi orang Papua, harus menjadi fokus manajemen senior, yang bertanggung jawab atas keberhasilannya. Seorang manajer senior di Indonesia harus mengadakan pertemuan berkala dengan perwakilan dari pekerja Papua.</p>	<p>Setuju. Pengembangan warga Papua secara rutin didiskusikan dalam Forum Kemampuan Operasi Tangguh dan kami mengimplementasikan program penarikan karyawan berpotensi tinggi dengan fokus pada para pekerja asal Papua. VP SDM Asia Pasifik menjadi koordinator kegiatan ini dan bekerja sama dengan VP Operasional Asia Pasifik serta Regional President kami untuk memajukan upaya ini.</p> <p>Mengingat hampir 70% staf Tangguh berasal dari perusahaan kontraktor, manajemen juga sedang dalam proses untuk mengubah strategi kontraktor untuk menyertakan bahasa kontrak yang lebih jelas yang mengharuskan perusahaan kontraktor untuk melaksanakan pengembangan warga Papua dan membangun tata kelola untuk melacak kemajuannya.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Departemen sumber daya manusia (HRD) terus memantau pengembangan karyawan Papua. Hal ini untuk memastikan bahwa rasio karyawan Papua memenuhi target. Rapat secara rutin yang melibatkan <i>Regional President</i>, VP operasi dan VP Sumber Daya Manusia (HRD) terus diadakan untuk membahas pembangunan Papua.</p> <p>Kami terus memprioritaskan tenaga kerja Papua dalam merekrut untuk proyek Tangguh agar dapat memenuhi target AMDAL.</p> <p>Menurut data pemantauan bulan Desember 2017, 51% tenaga kerja di operasi Tangguh adalah masyarakat Papua, dengan 329 diantaranya bekerja dengan posisi terampil atau manajerial.</p> <p>Selain itu, sampai bulan Desember 2017, tambahan 867 masyarakat Papua telah direkrut untuk mendukung proyek T3.</p>
	<p>8. Komunikasi dengan anggota DPRD dan MRP, keduanya memainkan peran penting dalam pemerintah Papua, harus ditingkatkan dan diadakan secara berkala.</p>	<p>Setuju. Anggota DPR provinsi Papua Barat dilantik pada tahun 2014 dan sejak saat itu telah bersengketa untuk menunjuk pimpinan DPR.</p> <p>Selain peningkatan keterlibatan, kami melaksanakan lokakarya dengan anggota DPR di tingkat provinsi dan bupati pada bulan September 2015. Kami akan terus melibatkan, serta menyelenggarakan lokakarya tahunan secara formal dengan para legislator.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BP menjaga komunikasi dengan pemangku kepentingan provinsi, termasuk DPRD dan MRP. Pada bulan Oktober 2017, anggota parlemen Provinsi Papua Barat mengunjungi Tangguh untuk melihat kemajuan operasi, terutama kegiatan pengangkatan gasnya. Selama kunjungan lapangan, mereka melihat lebih dekat fasilitas dan kegiatan TEP.</p> <p>Empat puluh dua anggota baru MRP Papua Barat telah ditunjuk dan peresmian telah dilakukan pada tanggal 21 November. Kami berencana mengadakan pertemuan rutin dengan anggota MRP yang baru untuk memberikan mereka update mengenai proyek Tangguh.</p>

	<p>9. Pemeliharaan gedung administrasi dan asrama di Tangguh telah diabaikan atau ditunda. BP harus meninjau ulang kegiatan perbaikannya dan menegakkan standar yang ketat terhadap personelnnya sendiri serta kontraktornya.</p>	<p>Keselamatan dan perawatan kilang LNG Tangguh merupakan prioritas kita untuk memastikan operasi yang aman dan andal. Fasilitas non-hidrokarbon seperti asrama dan gedung administrasi telah mematuhi standar kesehatan, keamanan dan kebersihan dengan pemeriksaan pembersihan secara reguler. Masalah kecil di fasilitas non-hidrokarbon diperbaiki jika perlu. Kami membedakan cacat perawatan dan kosmetik dan hanya penilaian teknis yang dapat membedakan keduanya. Data BP menunjukkan bahwa pusat administrasi dan asrama dirawat sesuai dengan praktik industri yang umum untuk jenis layanan seperti ini.</p>	<p>Telah selesai dilakukan. Pemeliharaan dilakukan secara teratur dan bangunan baru saja dicat pada akhir tahun 2016.</p>
	<p>10. Logo Tangguh harus dipakai secara lebih luas untuk mendidik penduduk setempat mengenai manfaat yang diperoleh dari program-program yang didukung oleh Tangguh.</p>	<p>Setuju. Kami akan meningkatkan upaya untuk memasukkan logo Tangguh dan SKKMigas di dalam aktivitas-aktivitas kami.</p>	<p>Sedang dalam persiapan Kami terus mendorong koordinator program dan mitra pelaksana untuk memasukkan logo Tangguh dan SKK Migas, untuk dukungan apapun yang diberikan oleh Tangguh.</p>

	<p>11. BP harus terus menjanjikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam penilaian lingkungannya. BP juga harus melanjutkan upaya untuk mengurangi pembakaran gas alam.</p>	<p>BP tengah mengevaluasi persyaratan untuk mencapai status Hijau dan Emas dan menilai kecepatan dan waktu untuk memenuhinya. BP terus mencari peluang untuk mengurangi pembakaran gas alam seperti perubahan untuk mengganti rute gas dari seal kompresor gas kering dari sistem pembakaran ke sistem bahan bakar.</p>	<p>Pada tahun 2016, BP dievaluasi sebagai kandidat status Proper Hijau dan, saat ini, kami sedang menjalani penilaian kepatuhan untuk tujuan tersebut.</p> <p>Kami menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengejar isu-isu di luar kepatuhan pada akhir September 2017, dan penilaian akhir oleh Kemertian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2017 yang menyimpulkan bahwa peringkat Tangguh untuk status PROPER telah meningkat dari peringkat 34 menjadi 26. Namun, sesuai dengan kebijakan KLHK, tingkat hijau, hanya akan berlaku bagi dua puluh lima kandidat terbaik, oleh karena itu proyek Tangguh tidak dianggap meraih gelar hijau pada tahun 2017. Kami akan terus mempertahankan untuk mengejar kandidat tingkat hijau di tahun depan.</p>
Keamanan dan hak asasi manusia	<p>12. BP harus menentang setiap perubahan pada ICBS, dan berupaya meneruskan perjanjian JUKLAP/PAMBERS dengan polisi selama jangka waktunya saat ini. Bila perlu, BP harus mendapatkan dukungan dari SKKMigas, Kapolda di provinsi Papua dan lainnya untuk mempertahankan JUKLAP/PAMBERS hingga tahun 2019.</p>	<p>Setuju, karena ICBS merupakan penopang falsafah keamanan Tangguh selain tindakan perlindungan fisik yang kokoh.</p> <p>SKK Migas dan Polda Papua Barat secara terus menerus mengupayakan prinsip dan prosedur yang terkait dengan ICBS dalam JUKLAP PAM HULU MIGAS. Tangguh terus mengukur dinamika lingkungan operasi keamanan di sekitar Tangguh, yang dapat meningkatkan ICBS serta tindakan perlindungan fisik</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>ICBS telah memberikan hasil yang diinginkan, seperti pembentukan jaringan antara masyarakat lokal, BP dan polisi; latihan gabungan antara BP, polisi dan TNI; peningkatan kepemilikan LNG Tangguh oleh masyarakat dan aparat keamanan setempat; dan, gangguan keamanan yang relatif rendah selama ini.</p> <p>JUKLAP yang ditingkatkan telah ditandatangani oleh kepala SKK Migas PAMALU dan Kapolda Papua Barat pada tanggal 23 Juni 2016.</p> <p>Ini menandai era baru ICBS, dimana tidak hanya dimiliki oleh LNG BP Tangguh dengan polisi provinsi, tetapi juga semua industri minyak dan gas di Papua Barat. JUKLAP menetapkan ketentuan untuk mengatur peraturan tentang keterlibatan aparat keamanan dan unit bantuan keamanan; kontrol keamanan dan prosedur penyebaran;</p>

			keterlibatan TNI berkaitan dengan keamanan aset nasional yang strategis; transparansi dalam dukungan finansial untuk unit bantuan keamanan; komitmen dalam menghormati hak asasi manusia (VPSHR); dan, pelatihan gabungan antara keamanan swasta perusahaan minyak dan gas dan keamanan publik (INP dan / atau TNI).
13. BP harus memberikan akses yang wajar dan, bila diminta, menjadwalkan kunjungan oleh Kapolda dan pejabat kepolisian lain ke Tangguh, namun harus menolak setiap kehadiran tetap polisi di lapangan LNG atau kampung-kampung di sekitarnya.	<p>Setuju bahwa menjaga hubungan yang membangun dengan penegak hukum merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh. Posisi ini diwujudkan dengan menerima kunjungan jajaran pimpinan Polda seperti yang diminta.</p> <p>Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.</p> <p>ICBS telah dipuji oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai strategi keamanan pilihan mengingat lingkungan tempat beroperasi kami dan mempertimbangkan kearifan lokal. Bidang-bidang yang perlu diperbaiki terus diidentifikasi untuk memastikan bahwa ICBS secara bertanggung jawab berada pada posisi untuk mengatasi berbagai dinamika keamanan yang terus berubah.</p>	Sedang berlangsung	<p>Tangguh telah beberapa kali menerima kunjungan oleh polisi; Demikian juga, Tangguh melanjutkan hubungan konstruktif dengan polisi dengan mengunjungi markas besar mereka di Manokwari.</p> <p>BP telah mengamati dirinya sendiri dan belajar dari pemangku kepentingan internal dan eksternal utama mengenai perubahan lanskap keamanan di dan sekitar Tangguh. Dalam hal ini, masukan telah diterima dari berbagai organisasi, seperti Polda Papua Barat, Kodam Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dewan Keamanan Nasional, SKK Migas, kedutaan asing, ICRC dan Grup Keamanan. Saat ini, keamanan BP sedang merevisi strategi keamanan Tangguh untuk memastikan bahwa hambatan preemption, pencegahan dan mitigasi telah dirancang dengan tepat untuk menangani perubahan lanskap.</p>
14. Fokus BP dengan komando kepolisian yang baru haruslah pada	BP menerima dengan tangan terbuka pembentukan komando polisi yang baru di Manokwari karena hal tersebut akan meningkatkan keterkaitan antara Tangguh	Sedang berlangsung	

<p>familiarisasi dan implementasi prinsip-prinsip ICBS dari JUKLAP/PAMBERS, termasuk ketiga lingkaran pengamanan, pelatihan tentang hak-hak asasi manusia bagi seluruh staff keamanan swasta dan polisi yang mungkin dipanggil dan pelatihan tahunan dengan partisipasi penuh kepolisian.</p>	<p>dan aparat penegak hukum. SKK Migas and Polda Papua Barat secara terus menerus mengupayakan prinsip dan prosedur yang terkait dengan ICBS dalam JUKLAP PAM HULU MIGAS.</p> <p>Komitmen kami terhadap Latihan Keamanan Bersama dengan Polda sudah jelas. Kami telah melaksanakan latihan tahunan sejak tahun 2007 kecuali tahun 2009 dan 2015 yang harus ditunda sehubungan dengan adanya perubahan prioritas keamanan pada Pilkada. Namun demikian, pelatihan internal VPHSR merupakan kegiatan yang terus dilaksanakan, dan terakhir diselenggarakan pada Kuartal 3 tahun 2015 dan melibatkan satuan polisi di Manokwari, Bintuni (juga dengan TNI), Babo, Fakfak, Aranday, dan Kokas.</p> <p>Latihan Keamanan Bersama ini tidak hanya dihadiri oleh Polisi dan BP, namun juga melibatkan pejabat pemerintah setempat, TNI, LSM dan media sebagai pengamat independen.</p> <p>Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM (VPSHR), BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.</p>	<p>Kami mengadakan pelatihan internal VPSHR untuk Polres Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di Papua Barat pada bulan April 2017, melibatkan partisipasi 100 petugas polisi. Pengukuhan disampaikan oleh ICRC dan diawasi oleh Komnas HAM Papua, LP3BH dan ELSHAM Papua.</p> <p>Selain itu, sesi pelatihan internal VPHSR lainnya untuk KODAM Kasuari dilakukan di Manokwari pada bulan Mei 2017, yang melibatkan ICRC dan divisi legal TNI.</p> <p>Latihan keamanan bersama (JSE), yang dirancang untuk memvalidasi kemampuan Tangguh untuk menangani peristiwa keamanan tingkat tinggi, dilakukan di lokasi Site antara tanggal 26 dan 30 November 2016. Pada bulan November 2017, JSE dilakukan di Babo dan di LNG Tangguh, dan termasuk latihan <i>tabletop</i>, pelatihan internal VPSHR, dan penilaian keamanan yang melibatkan Polda Papua Barat.</p>
<p>15. Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di Papua Barat atau Teluk Bintuni, komunikasi dan edukasi dengan para pimpinannya mengenai</p>	<p>Kami setuju bahwa menjaga hubungan yang membangun dengan aparat keamanan merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh.</p> <p>Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di lokasi terdekat, BP akan memprioritaskan keterlibatannya dengan lembaga dan pimpinannya berdasarkan manfaat dan fitur</p>	<p>Telah selesai dilakukan</p> <p>Pada bulan Mei 2017, kami menyelenggarakan pelatihan internal VPSHR dengan Kodam XVIII/Kasuari, yang melibatkan 100 personil dari Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat.</p>

	<p>ICBS harus menjadi prioritas BP.</p>	<p>ICBS, termasuk kecocokannya di dalam kerangka perlindungan obyek vital nasional strategis.</p> <p>Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.</p>	<p>Selain pelatihan tersebut, pimpinan keamanan BP bertemu dengan perwakilan Kasdam Kasuari XVIII dan menyampaikan update tentang TEP, nilai BP, dan ICBS, dan menawarkan pelatihan VPSHR agar diperpanjang.</p>
	<p>16. Komunikasi berkala harus diadakan dengan BIN, yang harus diundang untuk mengamati pelaksanaan pelatihan bersama tahunan dan untuk mengunjungi Tangguh. Akan tetapi, setiap permohonan kepada BP untuk mendukung kegiatan intel reguler atau tetap di lapangan LNG atau di kampung-kampung sekitarnya harus ditolak.</p>	<p>Setuju bahwa menjaga hubungan yang reguler dan membangun dengan BIN, di tingkat provinsi dan nasional, merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh.</p> <p>Sejauh ini terjalin hubungan yang positif antara BIN dan BP. BIN telah berpartisipasi dalam dua Latihan Keamanan Gabungan terakhir di Tangguh sebagai pengamat independen bersama-sama dengan pejabat pemerintah daerah, TNI, Media, dan LSM. Terlebih lagi, dalam beberapa kesempatan, BP telah berpartisipasi dalam sesi berbagi di markas BIN di Jakarta untuk mendiskusikan masalah-masalah seperti keamanan umum dan ICBS.</p> <p>Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.</p> <p>ICBS telah dipuji oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai strategi keamanan pilihan mengingat lingkungan tempat beroperasi kami dan mempertimbangkan kearifan lokal. Bidang-bidang yang perlu diperbaiki terus diidentifikasi untuk memastikan</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Komunikasi reguler dengan BIN telah ditingkatkan sehubungan dengan kegiatan berbagi informasi yang mencakup pembaruan TEP dan ancaman keamanan yang berpotensi mempengaruhi Tangguh.</p>

		bahwa ICBS secara bertanggung jawab berada dalam posisi untuk mengatasi berbagai dinamika keamanan yang terus berubah. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada berbagi informasi dengan pihak yang berwenang.	
	17. BP harus juga menekankan dalam komunikasinya dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama dengan pejabat keamanan publik, bahwa bagian penting dari ICBS adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar proyek berdasarkan saling menghormati.	Setuju. Komitmen kami terhadap ICBS sudah jelas; sehingga komunikasi kami dengan pihak yang berwenang yang terkait dengan menjaga hubungan yang positif dengan masyarakat sekitar berdasarkan saling menghormati harus mencerminkan komitmen ini.	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Kami telah melakukan beberapa kegiatan, untuk memastikan bahwa komunikasi kami dengan para pemangku kepentingan eksternal, pejabat keamanan publik dan masyarakat telah meningkat. Dari tahun 2016 sampai 2017, kami menyelenggarakan lokakarya tentang perpolisian masyarakat (FKPM) di Manokwari; sosialisasi hukum di Babo dan Kokas; VPSHR ToT di Manokwari; JSA untuk LNG Tangguh di Tangguh; Pelatihan internal JSE dan VPSHR di Tangguh; sosialisasi zona eksklusi di Kokas, Tanah Merah Baru, Saengga, Rejosari, Tomu, Sido Makmur, Weriagar dan Mogotira; dan pelatihan internal VPSHR di Kota Sorong dan Manokwari.</p> <p>Program ICBS di atas ditujukan untuk menjaga kemitraan kami dengan pemangku kepentingan eksternal.</p>

	<p>18. BP harus mengikutsertakan Genting secara langsung menyangkut pengaturan keamanan, menawarkan untuk berbagi pengalamannya dengan ICBS dan mengundang para pejabat keamanan Genting untuk mengamati pelaksanaan pelatihan tahunan; BP juga harus terus meminta SKKMigas dan pihak lain untuk mendorong Genting agar tidak menggunakan TNI atau polisi untuk pengamanan lapangan.</p>	<p>BP baru-baru ini telah membuat kemajuan penting dalam membagikan pengalaman ICBS kami dan komitmen terhadap VPSHR dengan pemangku kepentingan eksternal utama termasuk SKK Migas, Polda Papua Barat, dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas lainnya (termasuk Genting) dengan kehadiran bisnis di provinsi Papua Barat.</p> <p>Saat ini BP bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal tersebut untuk membuat JUKLAP PAM HULU MIGAS, yang secara prosedur akan mengatur sifat, tingkat, dan mekanisme pembayaran yang terkait dengan penyediaan layanan keamanan oleh pihak yang berwenang. Yang menjadi jantung dari instrumen hukum ini adalah komitmen terhadap prinsip-prinsip ICBS dan VPSHR.</p>	<p>Telah selesai dilakukan</p> <p>Genting berpartisipasi di lokakarya yang mengarah pada pengembangan JUKLAP, yang mencakup dukungan operasional untuk semua operator minyak dan gas di Papua Barat, termasuk Genting.</p>
--	---	--	--

Listrik dan daya	<p>19. Berkoordinasi dengan SKK Migas, dan bekerjasama dengan PLN, BP harus mengembangkan suatu jadwal bertahap untuk memperluas jangkauan listrik ke setiap kampung di mana infrastruktur sudah tersedia.</p>	<p>Perusahaan listrik milik negara (PLN) sebagai distributor listrik satu-satunya di Indonesia telah mengembangkan rencana untuk menyediakan listrik di kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Tanggung mendukung upaya PLN seperti yang diatur di dalam perjanjian Kesepakatan Pembelian Produksi dan akan terus bekerja sama dengan PLN dalam mewujudkannya.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Tanggung terus melibatkan pemerintah daerah dan PLN untuk memperluas program elektrifikasi.</p> <p>Saat ini, PLN sedang mengevaluasi kelayakan program untuk melaksanakan penambahan 4MW listrik di Bintuni.</p>
	<p>20. Di area-area di mana PLN masih harus membangun grid, BP harus meningkatkan dukungannya untuk kapasitas pembangkit diesel sehingga, paling tidak, fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas dapat mengandalkan tenaga listrik yang cukup dan berkelanjutan.</p>	<p>Prinsip AMDAL kami yang baru adalah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam program pembangunan kami. Kami kini sedang dalam tahap “bekerja dengan” pemerintah di mana masyarakat harus berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan dan listrik.</p> <p>Menyediakan dukungan sementara tersebut dapat meningkatkan ketergantungan dan harapan yang harus disediakan Tangguh dalam jangka panjang. Kami meyakini bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendukung sebagian besar layanan dasar ini dan akan terus membangun kemampuan dan fokus untuk memberikan bantuan darurat jika diperlukan.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Tanggung terus melibatkan pemerintah daerah dan PLN untuk perluasan program elektrifikasi.</p> <p>Saat ini, PLN sedang mengevaluasi kelayakan program untuk melaksanakan penambahan 4MW listrik di Bintuni.</p>

	<p>21. BP harus bekerjasama dengan SKK Migas, ESDM dan mitra regionalnya untuk memastikan bahwa LNG dapat disediakan bagi tenaga listrik Papua segera setelah dapat dilakukan secara teknis dan hukum.</p>	<p>Setuju. Menteri ESDM telah menerbitkan Surat Alokasi LNG untuk Provinsi Papua Barat (termasuk Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) untuk kebutuhan listrik di Kawasan Papua pada tanggal 18 Juni 2014. Sampai dengan 0,16 mtpa LNG atau setara dengan 20 mmscf/d gas akan tersedia untuk dijual dari LNG Tangguh ke BUMD. Dalam rancangan Proyek Pengembangan Tangguh, kami juga menyertakan dermaga LNG mini sebagai bagian dari cakupan untuk mengakomodasi rencana ini.</p> <p>Kami bekerja sama dengan SKK Migas dan ESDM untuk mewujudkan inisiatif Gas menjadi Listrik ini terutama untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan pada waktu yang sama saat Proyek Pengembangan Tangguh dimulai.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BP harus memiliki kemajuan untuk mencapai target-target proyek kilang 3 Tangguh pada tahun 2020, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia.</p> <p>Tangguh memfasilitasi beberapa studi kelayakan untuk mendukung program tersebut, termasuk alokasi dan distribusi LNG, yang melibatkan ITS (Institut Teknologi Surabaya).</p> <p>Pada tahun 2017, program ini fokus pada pembentukan BUMD dan mengidentifikasi mekanisme distribusi LNG.</p> <p>Untuk mempercepat program gas untuk listrik, tim BP bertemu dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) pada tanggal 14 Oktober 2017. Demi mencapai tujuan tersebut, KPIIP akan mengadakan rapat koordinasi berkala dengan semua pemangku kepentingan utama.</p>
<p>Perumahan pesisir pantai utara</p>	<p>22. BP juga harus meminta dukungan dari SKKMigas dan Bupati yang baru untuk memulai program restorasi perubahan di pesisir pantai utara pada tahun 2016, jika perlu, kendati jika izin akhir ekspansi Tangguh ditunda. Ini juga harus mengeksplorasi perluasan program ke kampung</p>	<p>Tangguh akan mendukung proyek yang akan dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Bintuni. Kami meyakini bahwa bekerja sama dengan pemerintah setempat merupakan pendekatan terbaik untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat. Kami akan melanjutkan persiapan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap perubahan rencana pada waktunya.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Untuk melaksanakan program tersebut, kesepakatan kerjasama telah ditandatangani oleh Bupati Teluk Bintuni dan BP Indonesia di Kota Bintuni pada akhir Desember 2016. Kesepakatan ini menandai dimulainya tahap implementasi program perumahan pesisir Pantai Utara.</p> <p>Kemajuan yang signifikan sudah tercapai pada program NSH. Pada awal Desember 2017, Bupati Teluk Bintuni mengeluarkan surat yang memungkinkan dimulainya kembali proyek NSH. BP dan pemerintah daerah Bintuni juga telah menandatangani amandemen kesepakatan</p>

	<p>Pantai Utara lainnya. Rencana pemulihan perumahan pantai utara masih dalam proses dan kami setuju bahwa program ini dapat mengatasi kecemburuan yang masih ada bagi penduduk Pantai Utara.</p>		<p>kerjasama proyek NSH untuk mencerminkan fase rehabilitasi (konstruksi) multi-tahun yang baru, yang sesuai dengan jadwal TEP, serta pencantuman Taroi sebagai distrik baru untuk pembangunan 2018. Proses tender pembangunan rumah di tiga distrik (Weriagar, Tomu dan Taroi) dimulai pada bulan Desember 2017. Pembangunan rumah akan selesai pada tahun 2020, sesuai dengan kesepakatan kerja sama.</p>
<p>Pekerjaan bagi orang Papua</p>	<p>23. Perekrutan orang Papua perlu menjadi tanggung jawab utama dari manajer senior. Selain itu, metriks interim harus dibuat, paling tidak secara tahunan, untuk mengukur kemajuan dari setiap komponen dan untuk melakukan penyesuaian apabila target tidak dicapai.</p>	<p>Setuju. Wakil Presiden (VP) Sumber Daya Manusia (HRD) telah ditugaskan untuk mengoordinasikan Program Pembangunan Masyarakat Papua dan memantau kemajuannya, meskipun hak memutuskan perekrutan dan pemekerjaan berada di tangan masing-masing VP. Metrik kemajuan ini akan membantu mengukur dan memfokuskan program.</p> <p>Perlu juga ditekankan bahwa kami berusaha untuk mencapai target 85% tenaga kerja asal masyarakat Papua sebelum tahun 2.029. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya akan tercapai melalui perekrutan. Seiring dengan upaya untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan operasi kami, pengurangan personel non-Papua di lokasi juga akan menjadi sarana untuk mencapai target sebesar 85%.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Departemen sumber daya manusia terus memantau pengembangan karyawan Papua. Hal ini untuk memastikan bahwa rasio karyawan Papua memenuhi target.</p> <p>Kami juga memprioritaskan perekrutan tenaga kerja Papua untuk proyek kami.</p> <p>Menurut data pemantauan bulan Desember 2017, 51% tenaga kerja di operasi Tangguh adalah masyarakat Papua, dengan 329 diantaranya bekerja dengan posisi terampil atau manajerial.</p> <p>Selain itu, sampai bulan November 2017, tambahan 760 masyarakat Papua telah direkrut untuk mendukung proyek T3. BP terus melakukan pemantauan terkait hal tersebut dengan kontraktor utama EPC untuk TEP. Sementara jumlah anggota rekrutmen saat ini berada di atas target AMDAL, distribusi cukup penting dan BP akan bekerja sama dengan kontraktornya untuk memastikan bahwa distribusi tersebut dipenuhi, karena jumlah personil yang lebih banyak akan direkrut untuk proyek tersebut.</p>

<p>24. Retensi dan promosi karyawan Papua juga harus menjadi tanggung jawab pejabat tingkat tinggi BP, kemungkinan Vice President Sumber Daya Manusia (HRD) atau manajer lapangan untuk Tangguh. Metriks khusus harus dipakai untuk mengukur kinerja, dan manajemen senior harus bertanggung jawab. Semua manajer senior harus diwajibkan untuk menjadi mentor atau pelatih teknis bagi orang Papua. Semua manajer yang lain harus didorong untuk melakukan hal itu, dan diberi penghargaan untuk melakukan hal itu secara efektif.</p>	<p>Setuju. Wakil Presiden bagian Sumber Daya Manusia (HRD) ditugaskan untuk mengoordinasikan Program Pembangunan Warga Papua dan untuk memantau kemajuannya. Metrik kemajuan ini akan membantu mengukur dan memfokuskan program.</p> <p>Program pembangunan terstruktur telah dilaksanakan sejak awal tahun 2015 untuk lebih meningkatkan nasionalisasi dan program pembangunan masyarakat Papua di Tangguh LNG.</p> <p>Untuk saat ini, tim Operasi memperkenalkan Program Perkembangan Kepemimpinan Tangguh yang menekankan pembinaan dan pembimbingan. Manajer senior Organisasi Operasi Global (GOO) telah secara terbuka menawarkan peluang pembimbingan bagi staf warga Papua dan akan terus mendukung dan mendorong staf untuk memanfaatkan tawaran itu.</p> <p>Kami juga membuat target kontrak kinerja bagi para manajer dalam pembangunan Papua dan kami melaksanakan evaluasi akhir tahun yang terstruktur dan identifikasi bakat untuk membantu menunjuk orang-orang yang siap dipromosikan berdasarkan prestasi mereka. Kami hanya akan mempromosikan orang yang siap dan memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan untuk menjalankan pabrik yang memiliki risiko bahaya yang tinggi.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BP membuat sebuah komite site, yang diketuai oleh VP operasi, untuk menangani masalah seputar pembangunan Papua, termasuk masalah retensi dan promosi, dan memberikan tanggapan.</p> <p>Evaluasi tentang kinerja individu dilakukan secara teratur, termasuk target kontrak pengembangan Papua untuk para manajer.</p>
<p>25. Komunikasi manajemen dengan karyawan Papua harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Para pekerja Papua di</p>	<p>Setuju. Pimpinan bagian operasional melaksanakan pertemuan <i>townhall</i> setiap kuartalnya dan rapat tim kecil untuk mengomunikasikan berita terbaru, termasuk tentang Pembangunan Warga Papua.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Empat pertemuan kuartalan triwulan telah dilakukan pada tahun 2017, yang mencakup pembaruan informasi tentang masalah pembangunan Papua. Ada juga jadwal</p>

	<p>Tanggung, atau grup perwakilan yang ditunjuk, harus bertemu secara berkala dengan manajer senior BP yang bertanggung jawab atas retensi dan promosi orang Papua.</p>	<p>Wakil Presiden bagian Operasional telah membuat sebuah komite pengarah Papua untuk mendorong pengembangan warga Papua lebih lanjut dan menilai kebutuhan jajaran di garis depan.</p>	<p>bagi manajemen senior untuk secara teratur bertemu dengan panitia pengarah saat berkunjung ke Tangguh.</p>
	<p>26. Sepanjang memungkinkan, karyawan Papua dari kontraktor utama yang bekerja di Tangguh juga harus diikutsertakan dalam komunikasi ini untuk memberikan kepada BP pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan-kesulitan yang ditemui para kontraktor dalam penerapan program retensi dan promosi orang Papua.</p>	<p>Setuju. Kami sedang mengimplementasikan beberapa perbaikan dalam strategi kontrak kami, dalam batas-batas dan lingkup peraturan pemekerjaan bersama, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dalam naskah klausul kontrak untuk menegakkan implementasi program pembangunan dan meningkatkan target pemekerjaan warga Papua; • Memperpanjang jangka waktu kontrak menjadi 5 tahun yang menyediakan lebih banyak waktu bagi kontraktor untuk mencapai program; dan, • Melatih manajemen kontrak yang bertanggung jawab untuk mengelola kinerja kontraktor dalam hal Pembangunan warga Papua. 	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BP terus memantau implementasi strategi kontrak baru mengenai target dan pengembangan ketenagakerjaan Papua. Tanggapan juga telah diberikan selama pertemuan tinjauan berkala (PRM) dengan kontraktor.</p>
<p>Pemeliharaan kesehatan</p>	<p>27. BP harus terus mendukung kapasitas dari dinas kesehatan kabupaten, dan bagi puskesmas yang melayani</p>	<p>Setuju. Sudah menjadi bagian dari komitmen AMDAL kami untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan layanan kebutuhan dasar. Kami meyakini bahwa kesinambungan kesehatan yang</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>Program kesehatan masyarakat Tangguh, berkolaborasi dengan yayasan YATIMA, terus mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni untuk memperbaiki kapasitas puskesmas guna memberikan layanan</p>

	<p>kampung-kampung di pesisir pantai utara dan selatan. BP harus menjelaskan kepada Bupati yang baru tentang kesediaannya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemeliharaan kesehatan untuk kabupaten.</p>	<p>terbaik akan tercapai dengan cara ini dimana pemerintah daerah menjadi pihak yang terdepan dan Tangguh terus mendukung melalui pembangunan kemampuannya.</p>	<p>kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Selama tahun 2017, beberapa sesi pelatihan untuk petugas kesehatan mengenai berbagai isu telah diadakan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pengawasan malaria. - Perawatan darurat neonatal. - Pelayanan untuk Ibu dan pemeliharaan kesehatan. - Penyaringan dan pengujian TB dan HIV. <p>Sejalan dengan 'bekerja dengan' prinsip, beberapa inisiatif kolaboratif telah dimulai sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai strategi yang dikembangkan oleh tim kesehatan LNG Tangguh untuk dilanjutkan melalui program pemerintah. Pembagian biaya kegiatan, seperti pelatihan untuk penyediaan layanan kesehatan, pengawasan dan infrastruktur, juga telah dilaksanakan.</p>
Edukasi	<p>28. Pendirian sekolah unggulan yang pertama di Teluk Bintuni harus merupakan prioritas pendidikan BP dengan target tanggal sebelum tahun 2019.</p>	<p>Setuju. Kami telah menyelesaikan penilaian kesenjangan untuk Sekolah Tanah Merah Baru untuk memahami lingkup dan skala yang dibutuhkan untuk memenuhi standar sekolah unggulan. Kami juga telah memasukkan aktivitas yang terkait dengan sekolah unggulan dalam aktivitas 2016 kami yang direncanakan akan memajukan program ini.</p> <p>Kami meyakini bahwa sekolah unggulan harus benar-benar sesuai dengan budaya Papua dan Bintuni. Karena itu, persiapan dan konsep awal merupakan aspek penting untuk mengembangkan sekolah unggulan. Hal ini akan dilakukan secara serius dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.</p>	<p>Sedang dalam persiapan</p> <p>Penilaian kesenjangan untuk pengembangan sekolah unggulan sudah selesai di awal tahun 2016 dan hasilnya telah dibagi ke pemerintah daerah. Selama tahun 2017, kami merekrut beberapa tenaga ahli untuk mengembangkan konsep andalan kami. Serial lokakarya telah dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ini melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dan yayasan lokal. Kami juga mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti studi perbandingan untuk mengetahui bagaimana sekolah unggulan berhasil diimplementasikan di Jayapura, Provinsi Papua, dan</p>

			Tomohon, Sulawesi Utara. Tender untuk mitra pelaksana program sudah dimulai, dan kami mengharapkan kegiatan dapat dimulai pada tahun 2018.
Pengembangan usaha orang Papua	29. BP harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli pertanian dan perikanan lokal hingga 65% dari kebutuhan operasional Tangguh, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.	Setuju. Kami telah berkomitmen dalam AMDAL untuk meningkatkan pembelian pertanian dan perikanan setempat menjadi 65% untuk kebutuhan operasional Tangguh. Program ini terbukti sangat efektif dalam membangun rasa kepemilikan dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tangguh akan terus memfokuskan pada pengembangan usaha lokal warga Papua dengan penekanan pada area strategi pertumbuhan diversifikasi untuk menciptakan efek perluasan yang lebih besar.	Sedang berlangsung Tangguh memprioritaskan pembelian produk dari desa-desa di sekitar proyek LNG. Seiring pembangunan TEP dimulai pada tahun 2017, permintaan komoditas lokal oleh tim catering Tangguh telah meningkat. Menurut data pemantauan, pada tahun 2017, catering Tangguh mensuplai dengan lebih dari 330 ton hasil perikanan dan pertanian dari delapan titik stok. Ini disamakan dengan US\$671.170.
	30. Pengadaan dan grup Manajemen Rantai Pasokan di Tangguh harus mengidentifikasi produk dan jasa yang potensial yang memenuhi syarat untuk pengadaan non-kompetitif dan	Program Pengembangan Usaha Masyarakat Asli (IEDP) dan tim Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai (PSCM) melakukan penilaian di tahun 2015 mengenai produk-produk yang berpotensi untuk aktivitas non-hidrokarbon di Tangguh Akan tetapi, karena strategi sosial kami berubah menjadi pengurangan ketergantungan masyarakat pada Tangguh, tim IEDP tidak akan menempatkan Tangguh sebagai satu-satunya pasar untuk program ekonomi	Sedang berlangsung Tim IEDP terus mengidentifikasi pelayanan potensial di Tangguh, yang dapat disediakan dan dikelola oleh pengusaha masyarakat asli Papua tanpa mengorbankan kualitas. Program ini juga memberikan bantuan teknis secara terus menerus, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi

<p>mengomunikasikan hasilnya secara luas sehingga bisnis Papua dapat berfokus untuk melayani kebutuhan ini.</p>	<p>setempat. Kami akan terus mengembangkan kemampuan Masyarakat Asli (IP) setempat dan meningkatkan daya saing mereka untuk memastikan produk dan layanan mereka akan diterima secara luas di pasar setempat, termasuk Tangguh. Pendekatan ini akan mendukung keberlanjutan.</p>	<p>persyaratan Tangguh. Sejak bulan Januari sampai November 2017, 63 perusahaan milik masyarakat asli telah menerima bantuan teknis dan bimbingan untuk bisnis. Kami berharap, hal ini akan meningkatkan kapasitas mereka agar lebih kompetitif dan memenuhi persyaratan bisnis minyak dan gas bumi dan Tangguh.</p>
<p>31. BP harus terus mendukung Jasa Pengembangan Bisnis (BDS) dalam upayanya untuk menciptakan usaha tambahan yang dikelola oleh IP di Bintuni dan kota-kota lain di wilayah ini namun harus menekankan pelatihan dan pembimbingan untuk IP untuk menghindari ketergantungan jangka panjang pada BP.</p>	<p>Setuju. Ini merupakan bagian dari AMDAL kami untuk fokus pada Masyarakat Asli dan juga untuk mengurangi kemungkinan peminggiran. Mendukung BDS untuk menambah usaha yang dijalankan oleh Masyarakat Asli, melatih dan membimbing usaha ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas hidup pemilik usaha dan keluarganya, namun juga penting untuk keberlanjutan usaha.</p>	<p>Sedang berlangsung</p> <p>BDS dikelola oleh SUBITU. BDS terus memberikan konsultasi dan pendampingan untuk pengusaha lokal secara gratis, terutama untuk masyarakat asli Papua.</p> <p>Pada bulan Februari 2017, dua koperasi yang dijalankan oleh masyarakat asli Papua yang dibimbing melalui program ini, yaitu KSU Rajaberefal di Babo, dan KSU Mayri di TMB, telah berhasil mendapatkan penghargaan selama tiga tahun sebagai pemasok peralatan stasioner BP. BDS juga terus memberikan bantuan teknis untuk bisnis-bisnis masyarakat asli Papua. Pada tahun 2017, 63 perusahaan masyarakat asli Papua telah menerima bantuan teknis untuk berbagai permasalahan bisnis, yang 15 di antaranya dijalankan oleh perempuan.</p>

